

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1848. Kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Hallet, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang.

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sangat dipahami bahwa pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berupa lahan yang subur, tenaga kerja yang produktif, dan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup dan hampir merata. Hal itulah yang menjadi keunggulan kompetitif Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hektar yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Pahan, 2008).

Agribisnis kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan nilai tambah, ekspor, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari sisi

makro sektor perkebunan masih menjadi parameter penyerapan tenaga kerja, investasi pembangunan, nilai ekspor komoditi, surplus neraca perdagangan, dan pendapatan para petani. Minyak kelapa sawit (MKS) merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku utama pembuatan minyak makan. Permintaan akan minyak makan di dalam dan luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa (Pahan, 2008).

Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dikenal dengan tiga bentuk utama usaha perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) (Mangoensoekarjo dan S Haryono, 2003). Pembangunan kelapa sawit baik yang dilakukan oleh perkebunan besar maupun oleh perkebunan rakyat telah berkembang dengan sangat pesat. Awal tahun 1968, areal kelapa sawit yang semula hanya terbatas di tiga wilayah (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) saat ini sudah berkembang di 22 daerah Provinsi. Luas areal tahun 1968 seluas 105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 8,992 juta hektar dengan produksi sekitar 23,096 juta ton minyak sawit (Anonim, 2012).

Dalam perkembangan pengusahaan perkebunan kelapa sawit, telah terjadi perubahan secara mendasar dalam pola pengusahaanya dan menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari komoditas perkebunan rakyat. Kalau pada awalnya perkebunan kelapa sawit hanya

dilakukan oleh perkebunan besar, maka saat ini terdapat areal kelapa sawit rakyat seluas 38 % dari total areal kelapa sawit (Anonim, 2012).

Tabel 1. Perkembangan luas lahan, produksi minyak sawit, dan produktivitas kebun kelapa sawit Indonesia menurut status pengusahaan tahun 2003-2009.

Tahun	PR			PBN			PBS		
	Luas (Ha)	Produk si (Ton)	Produk- tivitas (Ton/Ha)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produk- tivitas (Ton/ha)	Luas (000 ha)	Produksi (Ton)	Produk- tivitas (Ton/Ha)
2003	1,854	3,517	2.75	662	1,750	3.25	2,766	5,172	4.29
2004	2,220	3,847	2.49	605	1,617	3.16	2,458	5,365	3.03
2005	2,356	4,500	2.69	529	1,449	3.31	2,567	5,911	3.05
2006	2,549	5,783	3.13	687	2,313	3.62	3,357	9,254	3.74
2007	2,752	6,358	3.21	606	2,117	3.37	3,408	9,189	3.86
2008	2,881	6,923	3.33	602	1,938	3.82	3,878	8,678	3.42
2009	3,013	7,247	3.16	608	1,961	3.81	3,885	9,431	3.72

Sumber: Anonim (2012)

Keterangan:

PR : Perkebunan Rakyat

PBN : Perkebunan Besar Nasional

PBS : Perkebunan Besar Swasta

Permintaan minyak kelapa sawit dunia mengalami peningkatan setiap tahun terutama dari India dan Cina. Peningkatan permintaan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita penduduk dunia. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Saat ini pengusaha kelapa sawit mengalami kesulitan dalam memperluas lahan usahanya akibat pemberlakuan moratorium izin perkebunan baru dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang berakhir pada 20 Mei 2013 dan telah diperpanjang selama dua tahun ke depan.

Akibatnya peningkatan produksi sulit dilakukan melalui perluasan lahan. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah dengan peningkatan produktivitas kebun, terutama milik petani. Kebun sawit milik petani saat ini hanya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kira-kira 14 ton □ □ hektar tahun sedangkan kebun milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) bisa mencapai 36 ton □ □ hektar tahun (Anonim, 2012).

Perbedaan produktivitas ini disebabkan dualisme sistem ekonomi pertanian Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Boeke. Perusahaan kelapa sawit sudah menerapkan sistem pertanian modern dalam menjalankan usahanya sedangkan petani masih tetap menggunakan sistem pertanian tradisional (Mubyarto, 1987). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi TBS petani adalah dengan melaksanakan

program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) adalah pengembangan perkebunan dengan menggunakan Perkebunan Besar sebagai inti dan membimbing Perkebunan Rakyat sekitarnya sebagai plasma, dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Anonim, 2012)

Oleh karena itu dalam perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini, terdapat dua kelompok petani kelapa sawit, yaitu petani plasma dan non plasma. Petani plasma adalah petani pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dimana petani peserta memperoleh kepemilikan lahan masing-masing 2 Ha/KK yang berupa hak milik secara penuh dan berdaulat, yang terintegrasi dalam satu kesatuan usaha berskala ekonomi sebagai plasma dengan perusahaan perkebunan besar sebagai inti. Petani non plasma (independen) kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan lahannya, tumbuhan mana yang ditanam dan bagaimana mengelolanya; mengatur sendiri, mengelola sendiri, dan mendanai sendiri; dan tidak secara kontrak terikat dengan pabrik mana pun atau asosiasi mana pun (Marcus Colchester dan Norman Jiwan, 2010).

Melalui pola kemitraan, produksi TBS petani plasma diharapkan dapat menyamai produksi TBS kebun perusahaan dan lebih tinggi dari petani non plasma. Hal ini didasarkan bahwa sistem pengelolaan kebun petani plasma sudah menerapkan sistem pengelolaan kebun inti perusahaan yang sangat memperhatikan faktor-faktor pendukung produksi kebun. Faktor-faktor sebut adalah faktor alam (tanah), modal, tenaga kerja, dan manajemen. Modal yang

dimaksud adalah termasuk biaya untuk pembelian pupuk, pestisida, dan bibit. Mubyarto (1987) dan Soekartawi (1990) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi dua kelompok yakni : (1) faktor biologi seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat kesuburannya, varietas bibit, jenis pupuk, obat-obatan, gulma dan sebagainya, (2) faktor-faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, biaya tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tersedianya kelembagaan kredit, ketidakpastian dan sebagainya.

Pola kemitraan yang dijalankan berupa PIR-KKPA (Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer Anggota), dimana pengelolaan kebun dilakukan secara bersama-sama oleh para petani peserta koperasi primer tersebut. Konsep dalam kemitraan ini yaitu saling membutuhkan dan menguntungkan secara berkesinambungan. Masyarakat yang mengelola kebunnya (petani plasma) memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Sedangkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku untuk diolah dan dikomersialisasikan agar memperoleh profit. Tingkat kesejahteraan keluarga petani secara ekonomi belum tentu dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Kesejahteraan pada hakekatnya terdiri dari dua dimensi yaitu kesejahteraan secara ekonomi dan secara sosial. Dengan mengacu pada definisi kesejahteraan tersebut dan manusia sebagai mahluk sosial maka pemerintah dalam hal ini BKKBN memberikan tahapan-tahapan

kesejahteraan untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara sosial dan ekonomi yang sangat deskriptif dan mudah dipahami (Anonim, 2012).

Dengan pengembangan kelapa sawit rakyat ini merupakan salah satu tujuan pemerintah karena disamping untuk menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara juga memperluas kesempatan kerja dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona: luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang dengan pesat (Sugito, 1992).

Agar memperoleh tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan yang tinggi pada usaha kelapa sawit rakyat maka perlu diperhatikan bagaimana meningkatkan produksi, kualitas buah yang tinggi. Untuk itu diperlukan pengadaan modal bagi petani untuk membuka lahan dan pembelian bibit unggul kelapa sawit yang bermutu tinggi agar hasilnya bagus dan pertumbuhannya sempurna. Dalam pembangunan kelapa sawit perlu juga diperhatikan ketersediaan tenaga kerja, tanpa adanya tenaga kerja maka perkebunan kelapa sawit tidak akan berjalan baik, tenaga kerja dari keluarga petani sendiri maupun dari luar (Soetrisno, R dan R. Winahyu, 1991).

Modal untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat harus dipersiapkan sejak dini dan bersifat jangka panjang karena menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu relatif lama dan kondisi ekonomi yang baik. Modal digunakan untuk meningkatkan produktivitas

kelapa sawit jadi tidak hanya keperluan penyediaan lahan, biaya dan tenaga kerja, tetapi juga dalam meningkatkan pengetahuan petani melalui penyuluhan agar suatu usaha perkebunan kelapa sawit rakyat dapat berkembang dan mempunyai hasil yang dapat meningkatkan terhadap pendapatan petani plasma. Sehingga modal sangat menentukan berkembangnya suatu usaha petani perkebunan kelapa sawit (Mangoensoekarjo dan Semanggun, 2003).

Tingkat pendapatan yang diterima oleh petani plasma pada dasarnya hanya dari sumber tanaman pokok, yaitu hasil produksi kelapa sawit itu sendiri. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi belum berjalan atau belum berkembang suatu perkebunan petani plasma tanpa adanya peran lembaga ekonomi koperasi unit desa (KUD), karena penjualan produksi setiap kebun petani sebesar 30 % digunakan untuk angsuran kredit, untuk biaya perawatan, biaya produksi, dan biaya perawatan akses sekitar 20 % sedangkan sisanya sebesar 50 % merupakan bagian dari petani plasma kelapa sawit, maka dengan adanya peran koperasi unit desa sangat membantu petani plasma kelapa sawit untuk mengembangkan hasil usahatani (Sugito, 1992).

KUD merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri yang berguna untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Tugas-tugas KUD sebagai berikut : (1) Penyediaan, (2) Intensif produksi pada petani, (3) Pemasaran, (4) Pendidikan.

Keanggotaan KUD adalah masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada umumnya adalah kepala keluarga dan KUD bermaksud dapat menumbuhkan swadaya serta meningkatkan potensi pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna (Sugito, 1992).

Dengan adanya koperasi ini yaitu sebagai jembatan antara petani plasma dan perusahaan dapat mempermudah dalam penyaluran sarana dan prasana khususnya dalam usaha petani plasma kelapa sawit (Pahan, 2006).

B. RUMUSAN MASALAH

Koperasi Unit desa (KUD) sesuai dengan prinsip berdirinya diharapkan dapat berperan sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi dan peran serta masyarakat pedesaan dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat membantu para petani dan masyarakat pedesaan umumnya dalam bidang modal baik berupa sarana produksi, perkreditan, pengolahan serta jasa lainnya atau disebut juga dalam kegiatan-kegiatan berkoperasi. Melalui KUD Beringin Jaya Lesatari ini diharapkan koperasi dapat meningkatkan pendapatan usaha plasma KKPA di Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata.

Dalam rangka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Koperasi Indonesia berperan serta bertugas untuk:

1. Mempersatukan, mengarahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi , daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan

mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan yang merata
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi Indonesia

KUD diharapkan dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian pedesaan, khususnya di sektor-sektor : (a) Pertanian yang meliputi bidang-bidang pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan agro industry, (b) Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat pedesaan, terutama pangan, sandang, papan, (c) Jasa yang antara lain meliputi bidang-bidang simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik pedesaan dan konstruksi, (d) Industri kecil dan kerajinan rakyat, dan (e) Lain-lain bidang sesuai kemampuan dan keadaan setempat.

Koperasi sebagai satu sistem ekonomi sangat baik untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus untuk tercapainya pemerataan pendapatan anggotanya yang didasarkan atas falsafah keadilan dan tujuan koperasi, namun pendapatan petani dan kesejahteraan petani pada saat ini belum seperti apa yang diharapkan. Luasan lahan usaha petani sangat menentukan besar kecilnya pendapatan, taraf hidup dan tingkat kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan yang rendah umumnya sedikitnya lahan yang dijadikan usaha petani dan modal yang dimiliki, sehingga peran KUD sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani di Kecamatan Manis Mata.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan petani plasma diperlukan banyak modal dari pemerintah untuk para petani. Bantuan modal ini berupa kredit dengan biaya yang rendah dan bersifat memacu kegiatan usaha.

Salah satu ciri umum yang melibatkan masyarakat petani adalah permodalan yang lemah. Padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung pendapatan dan taraf hidup masyarakat petani itu sendiri. Kekurangan modal sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

Salah satu usaha pemerintah dalam membantu usaha masyarakat petani plasma dengan menyediakan fasilitas kredit yaitu Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) melalui peran koperasi. Dengan KKPA ini dapat meningkatkan usahatani sehingga produktivitas lahan dapat meningkat serta pendapatan petani juga meningkat. Adanya ketidaktepatan waktu penyaluran kredit / keterlambatan dalam penyaluran kredit dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan saprodi yang telah diterima oleh petani sehingga produksi tidak meningkat.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan koperasi di Kecamatan Manis Mata.
2. Untuk mengetahui peran koperasi terhadap pendapatan usaha petani plasma kelapa sawit di Kecamatan Manis Mata.
3. Untuk membandingkan pendapatan Plasma dan Non Plasma di Desa asam Besar, Kecamatan Manis Mata.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi pihak manajemen perusahaan dan Koperasi Unit Desa Beringin Jaya Lestari, studi ini berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam usahanya untuk dapat meningkatkan produksi dan efisiensinya supaya lebih memantapkan lagi kinerjanya.
2. Pihak pemerintah daerah, khusus di Kecamatan Manis mata untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pembinaan usaha petani plasma yang memiliki produktivitas kebun yang rendah.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah pengetahuan mengenai peningkatan pendapatan usaha petani plasma di Kecamatan Manis Mata, serta mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini ke dalam dunia kerja.